



## Pemkab Alokasikan DAU dan DBH 25 Persen untuk Infrastruktur



Bali Post/kmb38

**KOORDINASI - TAPD dan Banggar DPRD, Senin (19/2) kemarin membahas pergeseran pos anggaran APBD Induk 2018 menyusul terbitnya PMK No. 112 Tahun 2017.**

### Singaraja (Bali Post) -

Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112 Tahun 2017, komposisi alokasi anggaran dalam APBD Induk 2018 terpaksa dilakukan pergeseran pos anggaran. Buleleng harus mengalokasikan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 25 persen untuk membiayai kegiatan bidang infrastruktur.

Buleleng mendapat DAU pada tahun 2018 sebesar Rp 900 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp 225 miliar lebih harus digeser untuk bidang infrastruktur. Meski demikian, dana hasil pergeseran itu tidak ada yang dipergunakan untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor beberapa hari lalu. Dari perhitungan teknis, diperkirakan perbaikan pascabencana itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 8 miliar.

Hasil pergeseran itu mengikuti PMK No. 112 Tahun 2017, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaporkan hasil pergeseran tersebut kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Senin (19/2) kemarin. Rapat koordinasi tertutup tersebut dipimpin Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Dewa Ketut Puspaka. M.P. Sementara itu, Banggar hadir ketuanya Gede Supriatna bersama Wakil Ketua Ketut Susila Umbara bersama anggota banggar.

Dewa Ketut Puspaka mengatakan, amanat PMK No. 112 Tahun 2017 itu sudah diikuti di mana jatah DAU dan DBH yang tadinya dialokasikan berdasarkan Permendagri telah disesuaikan. Penyesuaian ini pun sudah melebihi ketentuan dalam PMK yang mewajibkan pemanfaatan jatah DAU dan DBH yakni sebesar 25 persen untuk menunjang kegiatan infrastruktur di daerah. Hasil penyesuaian ini pun kemudian dikoordinasikan kembali kepada Banggar, sehingga sesuai regulasi penyesuaian pelaksanaan APBD Induk 2018 diketahui oleh dewan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang anggaran. "Kita sudah sesuaikan dan sekarang kita laporkan kepada Banggar. Pada intinya kita sudah memenuhi ketentuan

Edisi : Edisi, 20 Feb 2018

Hal : 11



PMK itu dan ini memang karena APBD Induk kita bahas dengan acuan Permendagri termasuk alokasi DAU dan DBH, namun karena PMK terbit Januari 2018 jadi kita sesuaikan dan kami laporkan kepada Banggar," katanya.

Selain menyesuaikan alokasi DAU dan DBH, Pusaka juga melaporkan terkait perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD Induk 2018 mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD Induk 2018. Perubahan ini dilakukan karena Buleleng mendapat tambahan jatah DBH dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dia mencontohkan, tambahan jatah itu sudah diarahkan untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang sudah dialihkan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pengadaan mobil ambulans. Demikian juga tambahan DBH itu yang sudah diarahkan untuk program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. "Ini juga sudah kami sampaikan dan walau sudah lakukan pergeseran dan mengarahkan pos anggaran sesuai regulasi terbaru, wajib untuk membahas dengan Banggar dan detail sudah disampaikan kepada banggar. Catatan dewan juga sudah diakomodir di mana JKN dapat mengakomodasi warga miskin di daerah kita," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pergeseran karena terjadi perubahan regulasi itu telah disetujui oleh Banggar. Dia mengatakan, setelah mendiskusikan pergeseran itu, pada prinsipnya tidak ada permasalahan yang prinsip karena TAPD hanya melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.

Selain itu, dirinya juga sudah mendapat penjelasan bahwa tidak ada realisasi program yang terhambat atau bahkan sampai gagal dieksekusi hanya karena pergeseran beberapa pos anggaran tersebut. "Tidak ada hal prinsip dan ini karena pergeseran yang memang harus dilakukan karena terbitnya regulasi setelah APBD Induk 2018 disahkan. Program tidak ada yang terhambat atau gagal direalisasikan, karena hanya menggeser beberapa pos anggaran saja dan sudah dilakukan dengan sangat detail oleh TAPD," jelasnya.

Sementara itu, Dinas PUPR menghitung kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur irigasi sebesar Rp 6.175.000.000. Rinciannya kerusakan tanggul Sungai (Tukad) Banyumala, Kelurahan Banyuasri, tergerus sepanjang 300 meter diperkirakan menelan biaya perbaikan sekitar Rp 2,4 miliar. Kerusakan bendung sepanjang 20 meter dengan ketinggian 1,5 meter di Subak Belong, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar senilai Rp 950 juta. Sisanya kerusakan tanggul, senderan irigasi dengan kerugian Rp 800 juta sampai Rp 250 juta. Perbaikan kerusakan ruas jalan kabupaten sebesar Rp 1.466.000.000, dan rehabilitasi Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) perdesaan senilai Rp 339.279.000. Kerusakan SPAM perdesaan terjadi di Desa Tirtasari, Kayuputih, Tigawasa, dan Desa Sidatapa di Kecamatan Banjar, kemudian Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada, dan Desa Mayong, dan Joanyar di Kecamatan Seririt. Kerusakan terparah di Desa Mayong dengan kebutuhan dana Rp 173.688.000. Sedangkan kerusakan jalan, membutuhkan dana bervariasi antara Rp 100 juta sampai Rp 300 juta. (kmb38)

Edisi : 20 Feb 2018

Hal : 11